



KR-M Thoha

ABU MERAPI: Atap rumah warga di Desa Paten, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, nampak memutih akibat geyuran hujan abu Gunung Merapi, Kamis (10/3). Beritanya di halaman 1.

SOAL INVESTASI ILEGAL

Bareskrim Sita Aset Rp 1,5 Triliun

JAKARTA (KR) - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengungkapkan, pihaknya telah menyita lebih dari Rp 1,5 triliun terkait kasus investasi ilegal.

"Kalau tidak salah sudah lebih dari Rp 1,5 triliun yang sudah kami sita. Nanti berkembang karena kerja sama kami yang baik dengan PPAK (Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata Agus dalam konferensi pers, Kamis (10/3) di Jakarta.

Ia menyarankan kepada para korban untuk membentuk paguyuban

bersama guna mengurus pengajuan kepada pengadilan agar seluruh aset sitaan dapat dikembalikan kepada paguyuban yang dibentuk oleh korban-korban investasi ilegal ini.

"Saya imbau bentuk paguyuban, kemudian dinutrisi asetnya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Karena kalau sudah terbagi dan masih

ada korban yang belum kebagian, kan bisa menjadi masalah belakangan," ucap dia.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif agar terhindar dari praktik investasi ilegal. Semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan, semakin tinggi pula potensi penawaran tersebut merupakan penipuan.

"Hati-hati dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan sangat tinggi," tutur Agus, seperti dilansir

Antara.

Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat untuk memastikan pihak yang menawarkan investasi memiliki izin dari otoritas yang berwenang, sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Masyarakat juga harus memahami berbagai bentuk investasi yang ditawarkan, sehingga bisa terhindar dari hal-hal yang mungkin merugikan mereka.

"Oleh karena itu, mohon kepada masyarakat agar terhindar dari praktik investasi ilegal tersebut," kata Agus. (Obi)-d

Kejagung Sita 19 Kontainer Terkait Mafia Pelabuhan

JAKARTA (KR) - Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana mengungkapkan, telah menyita, mengamankan dan menyegel 19 kontainer terkait kasus mafia pelabuhan.

"Pada hari Rabu (9/3), telah dilakukan penyitaan sekaligus pengamanan dan penyegelan terhadap 19 kontainer," kata Ketut Sumedana kepada wartawan dalam konferensi pers yang disiarkan di platform Zoom Meeting dari Jakarta, Kamis (10/3).

Pihaknya melakukan penyitaan kontainer di 5 tempat, yakni Tempat Penampungan Pabean (TPP) PT. Tripandu Pelita, TPP PT. Trans Con Indonesia, TPP PT. Multi Sejahtera Abadi, TPP PT. Layanan Lancar Lintas Logistindo, serta Tempat Penimbunan Sementara (JICT) Tanjung Priok.

Sebanyak 19 kontainer tersebut merupakan milik PT HGI yang isinya adalah tekstil yang diimpor dari China. Penyitaan tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung setelah surat perintah penyidikan (sprindik) secara resmi diterbitkan pada 2 Maret 2022.

Dengan perkembangan kasus penanganan mafia pelabuhan ini, tim Kejaksaan Agung menduga hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan pengelolaan kawasan berikat di Tanjung Priok Jakarta Utara dan kawasan Tanjung Emas, Semarang. "Diduga juga ada unsur penyuapannya pada tahun 2015-2021," ujarnya.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih belum menetapkan tersangka mafia pelabuhan dan masih berada di tahap penyidikan umum. "Aset-aset belum ada juga yang dilakukan penyitaan," ucap Ketut Sumedana.

Pihak Kejaksaan Agung juga masih belum menetapkan besaran kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini. Sumedana mengatakan, masih dalam proses konsultasi dengan pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.

"Perkara ini memang baru dinaikkan 2 Maret 2022 lalu, baru dinaikkan penyidikannya dan baru 10 orang yang diperiksa dari saksi kasus mafia pelabuhan," kata Ketut Sumedana. (Ant)-f

REHABILITASI LAHAN KRITIS

Dimulai dari Pembangunan Persemaian

BOGOR (KR) - Presiden Joko Widodo meninjau Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/3). Pada kunjungan tersebut, Presiden menekankan bahwa pembangunan persemaian (nursery) merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam program rehabilitasi lahan di Tanah Air.

"Memastikan bahwa dimulainya program penghijauan rehabilitasi lahan-lahan kritis, rehabilitasi lahan-lahan yang sering longsor, rehabilitasi lahan-lahan yang daerahnya wilayahnya sering banjir itu betul-betul bisa kita mulai dari membangun nursery," ucap Presiden.

Hadir dalam peninjauan tersebut Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Dewan Pengarah BRIN Bambang Kesowo serta Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.

Presiden menuturkan, Pemerintah akan membangun sejumlah persemaian serupa di tahun 2022. Presiden menyebut hal tersebut juga dapat mendukung Pemerintah dalam melakukan penelitian terhadap kekayaan plasma nutfah yang terdapat di Indonesia.

"Di tahun 2022 kurang lebih 30 nursery seperti di nursery Rumpin ini akan bisa memproduksi kurang lebih 12 juta bibit tanaman, pohon, baik itu albasia, sengon, kemudian eukaliptus, manglid, ada juga jati, mahogany, semuanya ada," tuturnya.

Laksana Tri Handoko mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan riset untuk mendukung pengembangan bibit-bibit unggul sesuai karakteristiknya.

"Karena ini nanti diperlukan untuk mengatasi berbagai problem lingkungan dan kehutanan kita, dan setiap lokasi itu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda," tuturnya. (Ati)-d

Fathul Wahid Kembali Rektor UII

SLEMAN (KR) - Incumbent Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Fathul Wahid ST MSc PhD kembali melanjutkan kepemimpinan sebagai Rektor UII. Sebelumnya Panitia Pemilihan telah mengajukan tiga nama calon rektor hasil pemilihan Senat Universitas ke Pengurus Yayasan Badan Wakaf (PYBW) UII. Ketiganya Prof Fathul Wahid ST MSc PhD, Prof Riyanto SPd MSi PhD, dan Dr Ing Ir Ilya Fadjar Maharika MA IAI.

Dalam Rapat Pleno PYBW UII, Rabu (9/3), Prof Fathul Wahid yang meraih 67 suara ditetapkan sebagai Rektor UII periode 2022-2026, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII Periode 2022-2026 No 11/SK-PP/III/2022 tentang Penetapan Rektor Terpilih UII Periode 2022-2026. Sementara, Prof Riyanto meraih 19 suara, dan Dr Ilya 10 suara. Dalam Pemilihan Rektor, Senin (7/3), 114 anggota senat universitas memberikan hak suara.



KR-Isimewa

Prof Fathul Wahid PhD

Ketua Panitia Pemilihan Rektor dan Wakil Rektor UII Periode 2022-2026 Dr rer Soc Masduki MA, Kamis (10/3) mengungkapkan rasa syukurnya Pemilihan Rektor UII secara umum berjalan lancar, seluruh tahapan berlangsung baik. Selain itu, keterlibatan atau partisipasi sivitas akademika UII cukup tinggi, yakni 85 persen di tingkat pemilih umum dan 80 persen di senat.

"Yang paling penting proses Pemilihan Rektor kali ini lebih bernuansa kolaboratif dan mencerminkan kedewasaan para pihak seperti konstitan (calon rektor), juga pimpinan universitas, fakultas, badan wakaf dan seluruh sivitas akademika," tutur Masduki.

Prof Fathul Wahid saat dihubungi melalui pesan WhatsApp menyatakan, "Innallah wa inna ilaihi rajiun. Menakladi UII sebagai universitas besar dengan titipan amanah sejarah yang berat, bukan perkara mudah. Pengalaman empat tahun menegaskan itu. Ini amanah yang sangat berat," tuturnya.

(Fsy)-f

USAI PELONGGARAN ATURAN COVID-19

MUI: Shaf Salat Kembali Dirapatkan

JAKARTA (KR) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa ketentuan shaf salat dapat kembali dirapatkan usai Pemerintah memutuskan sejumlah pelanggaran terkait aturan pencegahan penularan Covid-19.

"Fatwa tentang kebolehan perenggangan shaf ketika salat itu merupakan rukhsah atau dispensasi karena ada udzur mencegah penularan wabah. Dengan melandainya kasus serta adanya pelanggaran aktivitas sosial, termasuk aturan jaga jarak di dalam aktivitas publik, udzur yang menjadi dasar adanya dispensasi sudah hilang," ujar Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/3).

Sebelumnya, Pemerin-

tah melakukan pelanggaran aktivitas masyarakat, termasuk pelanggaran untuk transportasi umum, seperti pesawat terbang dan kereta api. Kini, duduk itu umat Islam perlu jaga jarak dan dimungkinkan kapasitas 100 persen yang tertuang dalam SE Kemenhub 25/2022 tentang petunjuk perjalanan orang dalam negeri dalam transportasi perkeretaapian. Begitu pula dengan aktivitas olahraga juga sudah dimungkinkan dihadiri penonton.

Niam menjelaskan, adanya penyesuaian ini membuat aktivitas pejalan kaki di masjid dan perkantoran dapat kembali dilaksanakan dengan tetap disiplin menjaga kesehatan.

Dengan demikian, kata Niam, umat Islam diminta mengoptimalkan persiapan pelaksanaan

ibadah Ramadan dengan khusus dan semarak, namun tetap disiplin dalam menjaga kesehatan.

"Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan, untuk itu umat Islam perlu mempersiapkan diri lahir batin sebaik-baiknya. Ramadan sebagai momen untuk meningkatkan ibadah dan syiar keagamaan serta membangun solidaritas sosial. Kita optimalkan syiar, namun tetap waspada dan disiplin menjaga kesehatan," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, Pemerintah sudah menyiapkan peta jalan untuk membantu Indonesia melakukan transisi secara perlahan memasuki fase endemi.

"Sejalan dengan sejumlah negara yang sudah

melakukan pencabutan pembatasan Covid-19 dengan berbagai pendekatan, transisi dari pandemi jadi endemi ini juga perlu dilakukan secara bertahap," kata Reisa.

Reisa menuturkan, peta jalan itu akan digunakan untuk melakukan normalisasi dalam aktivitas masyarakat melalui kebijakan pengendalian virus. Dengan menetapkan target keterisian rumah sakit (BOR) ataupun angka kematian tetap berada pada level yang rendah.

Peta jalan itu juga disusun dengan berbagai pertimbangan dan kehati-hatian yang tidak hanya terpaku pada kesehatan dan ilmu sains, namun juga melihat dari berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat seperti sosial, budaya, ekonomi. (Ant/San)-f

SURYA PALOH-AIRLANGGA HARTARTO

Bahas Polemik Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA (KR) - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto melakukan pertemuan di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta, Kamis (10/3), yang salah satunya membahas soal polemik penundaan Pemilu 2024.

"Terus terang saja kami mendiskusikan hal itu," kata Surya Paloh kepada wartawan usai pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam.

Menurut Paloh, meski ada perbedaan perspektif atau pandangan di antara kedua parpol terkait penundaan Pemilu, namun mereka sepakat untuk tidak mempermasalahkan perbedaan itu berkepanjangan.

"Tidak perlu ada satu dikursus yang berkepanjangan. Silakan kalau memang para pihak bisa meyakini bahwasanya konsepsi gagasan tawaran pikiran itu bisa berjalan dan diteruskan. NasDem tetap menghargai, tapi NasDem tentunya sama saudara saya dari

keluarga besar DPP Golkar, tidak ada perbedaan di antara kita," kata Surya.

Dia pun berharap perbedaan pandangan terkait penundaan Pemilu tidak menjadi polemik ke depan. "Jadi tidak ada polemik masalah ini lagi ke depan karena kami menyadari tetapih sisa energi yang kita miliki harus bisa kita curahkan fokuskan untuk lebih produktif. Kita menghadapi sebuah ancaman resesi baru karena pergolakan dunia yang ada terjadi di dunia internasional," papar Surya Paloh.

Ditambahkan, partainya tidak akan proaktif untuk menggagalkan pembahasan penundaan Pemilu 2024 di antara para ketua umum partai koalisi. Namun, jika diminta saran, ia memastikan akan memberikan masukan sesuai komitmen NasDem menolak penundaan Pemilu.

"Saya tidak mengambil posisi

proaktif. Saya sudah menjelaskan sikap Partai NasDem yang jelas di tengah-tengah publik. Tapi kalau saya diminta sebagai kakak, sebagai senior, tentu saya harus ambil inisiatif itu, kita lihat ke depannya," kata Surya Paloh.

Sementara Airlangga Hartarto menyebutkan, sikap Golkar terhadap wacana penundaan Pemilu berasal dari aspirasi masyarakat. "Dari Partai Golkar kami sudah sampaikan bahwa pertama tentu di masyarakat ada suara-suara yang harus kami serap," katanya.

Kedua, sudah dibahas juga bahwa politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua umum partai dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua-ketua umum partai yang mendukung Presiden Jokowi. Terlebih, Presiden Joko Widodo tetap menghargai adanya perbedaan pandangan atau pendapat, selama sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. (Ant/San)-f



KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

MONYET EKOR PANJANG: Petugas pemadam kebakaran menaruh monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*) yang berhasil dievakuasi di Klaten, Jawa Tengah, Kamis (10/3). Pemadam Kebakaran Klaten berhasil mengevakuasi seekor monyet ekor panjang liar yang masuk ke rumah warga.